

Dimana antara dua pihak dapat melanjutkan yang mengakibatkan adanya perpindahan hak milik dari pihak satu kepada pihak lain.

Dengan terjadinya perpindahan hak milik ini, maka dibutuhkan suatu cara-cara yang dapat mempertegas, bahwa benda yang dijadikan obyek itu telah menjadi milik orang lain (berhutang dengan perjanjian). Sebab dengan adanya akad ini merupakan salah satu cara yang sah dalam memperoleh hak milik yang sempurna dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian, maka di dalam pelaksanaan qi - radh itu terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun merupakan unsur yang dipenuhi dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.

Adapun yang menjadi rukun dalam pelaksanaan qi - radh itu ialah :

1. Orang yang memberi hutang.
2. Orang yang berhutang.
3. Barang yang dihutangkan.
4. Ucapan ijab - qobul. (Suhrawardi, 1994 : -

c. Tuntunan para sahabat

Dalam masalah ini ada suatu dasar hukum yang kuat untuk dijadikan sebagai dasar mudharabah yaitu : tindakan Kholifah Umar bin Khottob terhadap kedua putranya yaitu : Ubaidillah dan Abdullah. Dimana pada saat itu kedua putra Kholifah tersebut ikut bersama bela tentara ke Iraq, setelah keduanya bertemu dengan bawahan Kholifah Umar yang mau mengirimkan barang ke Kholifah. Amir tersenut adalah Abu Musa As 'Asy'ari, yang menjadi amir di Basroh, kemudian kedua putra Kholifah itu ditawarkan modal oleh amir dan diterimanya. Dengan modal yang diperoleh dari amir itu dijalankan di kota Madinah. Peristiwa tersebut diketahui oleh Kholifah dan kedua putranya dipanggil dan diperintahkan untuk menyerahkan semua modal dan keuntungannya yang diperoleh dari perdagangan tersebut. Tetapi diantara majlis itu ada salah seorang sahabat yang menyatakan, hendaknya Kholifah berakad mudharabah yaitu : mengembalikan modal pokok - nya saja dan pembagian keuntungan antara kholifah dengan kedua putranya sesuai dengan kesepakatan bersama. (Sabiq 1988 : 37).

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. Rukun Mudharabah

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa rukun merupakan bagian yang sensial dalam suatu pembahasan. Tapi rukun dalam suatu pembahasan itu harus ada sebab tanpa adanya rukun suatu pembahasan itu batal, begitu juga dengan pelaksanaan mudharabah. Maka dari itu dalam pelaksanaan mudharabah disyaratkan harus memenuhi rukun-rukunnya.

Mengenai rukun mudharabah antara para Ulama' satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan. Yang menjadi perbedaan mereka ini didasarkan atas ilmu pengetahuan yang berlainan, tetapi pada prinsipnya sama yaitu : menetapkan rukun yang harus dalam pelaksanaan mudharabah. Adapun pendapat para Ulama' mengenai rukun mudharabah diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut Abdul Rohman Al-Jaziri.

- a. Orang yang menyerahkan harta.
- b. Harus adanya akad.
- c. Adanya pihak yang sanggup untuk menjalan -

masih tetap dipertanyakan adalah mengenai bunga bank apa sama dengan riba yang jelas-jelas haram hukumnya atau tidak. Menjawab masalah ini ada yang pro dan kontra, hal ini dapat membingungkan bagi umat Islam (khususnya) dan timbul keragu-raguan tentang masalah bunga itu apa riba atau bukan sebab belum ada jawaban yang pasti.

Sehubungan dengan masih adanya keraguan-keraguan dari umat Islam mengenai sistem pada bank yaitu sistem adanya bunga yang telah diterapkannya. Walaupun demikian masih tetap melaksanakan sebab tidak ada pilihan lain bagi umat Islam, kecuali harus menerima jasa dari bank dengan sistem bunga itu. Untuk menghilangkan keragu-raguan tentang bunga bank (apa riba atau bukan), maka para Ulama' dan ahli ekonomi yang beragama Islam membentuk suatu organisasi yang disebut dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Dalam sidang yang dilaksanakannya, mencari jalan keluar yang tidak meragukan lagi yaitu bank yang sesuai dengan petunjuk dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Maka tercetuslah suatu gagasan untuk mendirikan suatu lembaga keuangan multilateral yang akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dari Syari'at Islam, lembaga ini disebut dengan Islamic Development Bank (IDB). (Bonus Kiblat, 1990 : 3).

sistim pelaksanaan pada bank-bank yang sekarang ini, yaitu sistim adanya bunga bagi nasabahnya. Yang menjadi masalah bagi umat Islam itu adanya sistim bunga, apa bunga pada bank sama dengan riba atau bukan. Para Ulama¹ dan ahli ekonomi menjawab masalah bunga ini berbeda-beda pendapat satu sama lainnya dengan argumentasi yang sama sama kuatnya. Dari beberapa pendapat mereka dapat di - simpulkan ke dalam suatu kesimpulan ada empat kelompok yaitu :

- a. Bunga bank sama dengan riba, berarti hukumnya haram.
- b. Bunga di bank adalah Mustasyabihat belum jelas atau tidak kuat dan dalil yang menghalalkan tidak kuat. Berarti masalah ini perlu dihin - darkan agar selamat.
- c. Bunga di bank adalah haram tetapi dibolehkan , disebabkan karena dalam keadaan darurat.
- d. Bunga di bank adalah halal, sebab lebih banyak manfaatnya daripada mudhorotnya (kerugiannya).

Namun setelah dikaji dengan teliti definisi bunga bank, maka dapat diketahui bahwa, pada umumnya bunga bank itu diartikan sebagai biaya yang dikenakan kepada penyimpan uang atau imbalan yang diberikan kepada pe - ngimpan uang yang besarnya telah ditetapkan di muka.

Biaya atau imbalan tersebut ditetapkan dalam bentuk prosentase dan akan terus dikenakan selama masih ada sisa simpanan atau pinjaman, sehingga tidak terbatas pada jangka waktu kontraknya.

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat ditafsirkan bahwa :

- a. Pengenaan bunga telah ditetapkan di muka dalam bentuk prosentase, maka pemilik uang berhak atas pengembalian hutang ditambah dengan bunganya sesuai dengan prosentase yang telah ditetapkan itu tanpa memperdulikan apakah peminjam mendapat keuntungan dari pinjaman tersebut atau tidak. Hal ini tidak sesuai dengan Al-Qur'an surat (31) Al-Luqman : 34 tersebut di atas.
- b. Pengenaan bunga ditetapkan dalam bentuk prosentase, maka bunga merupakan kelipatan perseratus dari sisa pinjaman dikalikan jangka waktu pinjaman. Dengan jangka waktu tertentu ini bisa terjadi suatu saat jumlah yang berlipat ganda dari jumlah pokok pinjaman. Hal ini tidak sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat (3) Al-Imron : 130 tersebut di atas.

c. Pengenaan bunga ditetapkan dalam bentuk prosentase ini apabila peminjam tidak dapat menyelesaikan hutangnya pada waktu tempo, kewajiban membayar bunga tetap akan terus berjalan secara otomatis terhadap sisa hutang dan bunganya itu. Hal ini tidak sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat (2) Al-Baqoroh : 280.

Dari beberapa penafsiran di atas, maka Ulama' dan ahli ekonomi OKI dapat menarik suatu kesimpulan bahwa, sistem bunga bank yang dipraktekkan pada saat sekarang ini mendekati pada pengertian riba. Sedang menurut Moh. Hari Saewarno, bahwa bunga bank sama dengan sewa. Jadi uangpun bisa disewakan seperti halnya rumah ataupun barang lainnya. Bunga bank itu disebut laba sewa, sedang sewa dalam dunia Islam disebut Al-Ijarah dan dibenarkan atas pungutannya. Pungutan bunga atau sewa pada uang di bank tidak mengandung lipat ganda dan masih dalam jangkaan laba yang wajar jika ditransaksikan, maka halal hukumnya. Kecuali bila tarif sewanya berlipat ganda, sekalipun namanya sewa tetap riba dan diharamkan. (Soewarno, 1990 : 35).

4. Perbankan Menurut Syari'at Islam

Untuk mengetahui bank yang beroperasi sesuai dengan Syari'at Islam, maka bank itu haruslah berpedoman kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan berpedoman pada kitab Allah dan Sunnah Rosul, maka dapat diketahui ciri-ciri pokok pada bank yang beroperasionalnya yang sesuai dengan Syari'at Islam, diantaranya sebagai berikut :

- a. Biaya uang dijabarkan dalam akad dengan bentuk jumlah nominal, baik untuk biaya administrasi, biaya pelayanan pinjaman dan keuntungan pembelian barang dengan pembayaran tangguh atau cicilah atau sewa.
- b. Penggunaan prosentase untuk pengenaan biaya uang selalu dihindarkan, karena sistim ini mengandung unsur pelipat gandakan uang.
- c. Larangan adanya keuntungan yang pasti, yang ditetapkan dalam kontrak. Dengan sistim mudhorobah dan musyarokah, keuntungan dapat ditetapkan apabila itu merupakan modal jual-beli melalui kredit pemilikan barang atau sewa guna usaha.
- d. Dana dalam bentuk deposito oleh penyimpan dianggap sebagai titipan, sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan se-

bagai penyertaan dana pada bank Islam. Penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti, bila bank mendapat keuntungan penyimpan mendapat bagian pula keuntungan itu.

- e. Dalam transaksi bank Islam dilarang melakukan jual-beli atau sewa uang dari mata uang yang sama, misalnya : (Rupiah dengan Rupiah). Pada bank Islam memberikan pinjaman tidak berupa uang tapi pembelian barang oleh pihak bank yang ditunjuk oleh nasabah, kemudian dijual atau sewa kepada nasabah dengan pembayaran tangguh atau cicilan.
- f. Pemberian pinjaman pada bank Islam tidak memerlukan jaminan hutang sebab barang yang ada dinasabah adalah masih milik bank selama nasabah belum lunas hutangnya.
- g. Sebagai bank yang berada dimasyarakat yang telah lama mengenal bank tradisional, maka bank Islam tidak bisa menghindar dari transaksi imbalan bunga, tetapi hasil dari bunga digunakan untuk menyantuni masyarakat muslim yang kena musibah dan untuk membiayai kebutuhan masyarakat muslim yang sifatnya sosial. (Bonus Kiblat 1990 : 9).

